

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan sistem informasi manajemen merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta penyampaian layanan. Menurut Angga (2005) pemanfaatan teknologi informasi yang baik untuk mengelola informasi dalam organisasi dapat mengurangi tahapan proses kerja yang dianggap memperlambat pencapaian hasil kerja.

Salah satu bentuk pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam organisasi pemerintahan adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang merupakan sistem database yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dalam sistem akuntansinya mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Hertanto, 2017).

Sesuai dengan visi BPKP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah

sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Pengelolaan keuangan diwujudkan dengan lahirnya *Good Governance* dengan memperkenalkan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil serta transparansi. *Good Governance* (pemerintahan yang baik) merupakan sebuah paradigma yang berupaya mewujudkan administrasi pemerintahan yang akuntabel dan partisipasi yang lebih luas. Secara umum *Good Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antar pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya.

Terdapat beberapa rumusan Undang-Undang yang merupakan kristalisasi dari perwujudan reformasi manajemen yaitu Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, merupakan kristalisasi dari perwujudan reformasi manajemen.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan tujuan untuk pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dengan 3 faktor pendukung sebagai berikut: mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen

daerah, mengarah ke *grand design Data Base Management System (DBMS)*, Memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA, Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Sistem pengelolaan keuangan pertama kali dikenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun 2003 dengan versi 1.0 lalu dikembangkan lagi dengan banyak versi untuk lebih meningkatkan kualitas aplikasi SIMDA tersebut. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kemendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan. Saat ini seluruh daerah kabupaten atau kota masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai aplikasi pembantu pemerintah daerah pada sistem akuntasinya yang dimana mulai dari menyelenggarakan hingga mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengoperasian pengelolaan data keuangan SIMDA dinilai sangat rumit atau tidak *user friendly* yang tidak mengikuti perkembangan teknologi pemrograman yang sudah berfokus kepada kenyamanan penggunaan dari *user*. Sedangkan dilihat dari segi penggunaan perangkatnya sendiri, SKPD yang mengunggah data ke sistem cenderung mengalami kesulitan karena tidak didukung dengan jaringan yang memadai sehingga penginputan data

mengalami kemacetan dan berdampak pada keterlambatan pengolahan data keuangan.

Pengembangan Aplikasi SIMDA melanjutkan perancangan, pengembangan dan pemeliharaan (*maintenance*). Hingga 30 Juni 2020, Program Aplikasi SIMDA tercatat telah diimplementasikan pada 440 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pemerintah Daerah Pengguna SIMDA

No	Jenis Implementasi	Jumlah Pemerintah Daerah
1	SIMDA Keuangan	394
2	SIMDA BMD	403
3	SIMDA Gaji	51
4	SIMDA Pendapatan	169
5	SIMDA Integrated	196
6	Dashboard Keuangan	5
7	Koneksi CMS	225
8	Pemda Pengguna SIMDA	440

Sumber: BPKP, 2020

Tujuan penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hertanto,dkk (2016) tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa masih ditemukan adanya masalah dalam penerapannya sehingga masih belum cukup untuk dikatakan

bahwa pelaksanaan SIMDA memberikan dampak efektif pada lingkup organisasi pemerintahan, melainkan hanya pada batasan tingkatan kelompok yaitu SKPD hal ini terjadi karena masih terdapat hambatan-hambatan yang sangat signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Darea, dkk (2015) tentang Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya SIMDA keuangan proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Proses penyajian dan penerapannya sudah terorganisir dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2013) tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA keuangan sebagai sistem akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengolahan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu lembaga pengelolaan keuangan di Kabupaten Manggarai Barat yang masih aktif menggunakan SIMDA adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh BPKD diantaranya adalah SIMDA Bidang Keuangan yang membantu mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan. Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) juga telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengimplementasikan beberapa jenis SIMDA diantaranya SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan. Penggunaan beberapa SIMDA ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola keseluruhan administrasi dan keuangan sehingga menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien. Pemanfaatan SIMDA ini dimulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga proses pertanggungjawaban pengelolaannya.

Dalam penerapannya, SIMDA harus memenuhi beberapa kriteria sehingga dikatakan efektif. Hasil wawancara dengan bapak Roland Djaga selaku Operator SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat bahwa pelaksanaan dan penerapan SIMDA di Kabupaten Manggarai Barat masih belum bisa dikatakan efektif, karena masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi selama ini dalam penerapannya yaitu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).

Kendala terkait dengan pengelolaan data keuangan menggunakan SIMDA yang pada akhirnya menghambat *output* yang diharapkan. Masalah penerapan SIMDA jika dilihat dari segi kelemahan dalam pengelolaan data keuangan antara lain sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data, sering tidak keluar/tampil laporan atau report yang diinginkan user, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/tampil dalam laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan dan juga

terdapat beberapa faktor yang dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan sistem.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat ?
- 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dari penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penerapan (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dari penerapan SIMDA Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat ?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan informasi dan pengetahuan mengenai Analisis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis dan dapat memperkaya referensi yang telah ada.
- b. Penelitian ini berguna sebagai sarana berlatih menulis sekaligus menambah wawasan penulis sebagai bekal dikemudian hari.